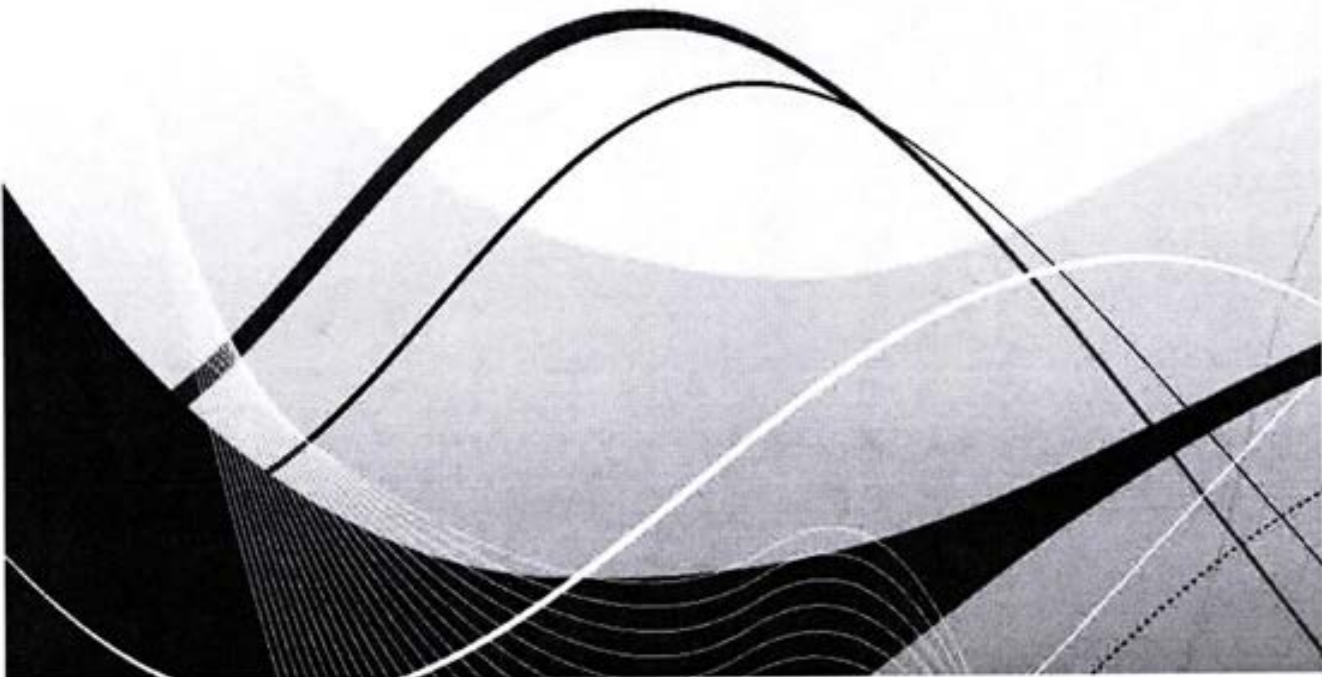


Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor : P.2/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P.2/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2021

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan perlu dibuat perjanjian kinerja tahun 2021 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - b. bahwa perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf a, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.12/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2020 Tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2021 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.**

Pasal 1

Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021, serta menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2021.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya dan Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4


- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk :
 - a. menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program;
 - b. membuat Rencana Aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- (2) Format pernyataan dan matriks sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana lampiran II;
 - b. Rencana Aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana lampiran III.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,


ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI
NIP. 19720123 200012 1 001

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Lampiran I.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : P.2/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2021

Tanggal : 25 Januari 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S,Hut., M.P.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S,Hut., M.P.
NIP. 19710521 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
		001. Gaji dan Tunjangan.	
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
		051. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran.	6 Keg.
		052. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	6 Keg.
		053. Pengelolaan data dan informasi.	7 Keg.
		054. Pengelolaan keuangan.	3 Keg.
		055. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal.	6 Keg.
		056. Pengelolaan Kepegawaian	7 Keg.
		057. Pelayanan umum dan perlengkapan	8 Keg.
		058. Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	3 Keg.
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	10 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	10 unit
5432.EAE.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana internal.	1 unit
5432.EAE.001.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana internal satker terlaksana	1 unit

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 67.393.543.000,- (Enam puluh
tujuh juta tiga ratus sembilan
puluh tiga juta lima ratus empat
puluh tiga ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Farsol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Roosie Tjandrakirana, M.SE.
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Roosie Tjandrakirana, M.SE.
NIP. 19650416 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

ESELON II : DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran.	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor Dit. RPPWPH.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum.	Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana	1 Layanan
		059. Dukungan manajemen Direktorat RPPWPH.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan.	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	
5435.ABV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penelaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan diterbitkan dan Rekomendasi kebijakan sesuai Rencana kehutanan diterbitkan.	11 Rekomendasi
5435.BAH.	Pelayanan Publik Lainnya	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	300 Layanan
5435.PBH.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya penguatan kelembagaan untuk pengelolaan SDA berbasis masyarakat.	1 Rekomendasi
5435.QMA.	Data dan Informasi Publik	Seluruh permohonan penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP terlayani dan Rekomendasi kebijakan sesuai Rencana kehutanan diterbitkan.	2 Layanan

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 781.886.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Rp. 5.680.280.000,- (Lima milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 6.462.166.000,- (Enam milyar empat ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Rencana, Penggunaan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan,



Ir. Roosi Tandrakirana, M.SE.
NIP. 19650416 199103 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M., M.Sc.
NIP. 19681101 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

ESELON II : DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik.	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	2 Layanan
5434.BMA.001.	Data dan peta kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	1 Layanan
5434.BMA.004.	Layanan Informasi Geospasial	Penyediaan informasi terlayani dan diperbaharui setiap tahun	1 Layanan

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rp. 748.492.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Rp. 3.280.000.000,- (Tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 4.028.492.000,- (Empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

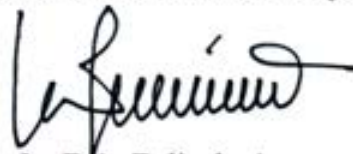
Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M, M.Sc.
NIP. 19681101 199303 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.

Jabatan : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran.	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor Dit. PPKH.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum.	Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana	1 Layanan
		059. Dukungan manajemen Direktorat PPKH.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	
5433.BAH.	Pelayanan Publik Lainnya.	Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	30 Layanan
5433.BMA.	Data dan Informasi Publik.	Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani.	1 Layanan
5433.PCD.	Perizinan Lembaga.	SK Penetapan Kawasan hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	26 Institusi
5433.QAH.	Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 Layanan

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 2.007.964.000,- (Dua milyar tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

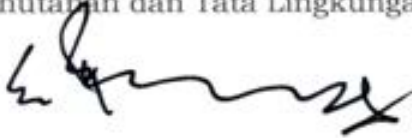
Rp. 4.947.624.000,- (Empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 9.955.788.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

ESELON II : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran.	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor Dit. PDLKWS.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum.	Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana	1 Layanan
		059. Dukungan manajemen Direktorat PDLKWS.	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan.	Seluruh Rencana Pembanguna sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	
5436.PBJ.	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.	7 Rekomendasi Kebijakan
		Rekomendasi kebijakan Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.	1 Rekomendasi Kebijakan
5436.QMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	5 Layanan
5436.UBA.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daewah	Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya.	15 Daerah

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 705.998.000,- (Tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Rp. 6.950.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Jumlah

Rp. 7.655.998.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran.	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor Dit. PDLUK.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum.	Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana	1 Layanan
		059. Dukungan manajemen Direktorat PDLUK.	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan.	Seluruh Rencana Pembanguna sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	
5436.PBJ.	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan diterbitkan dalam rangka penerapan kegiatan.	3 Rekomendasi Kebijakan
5436.QMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani.	1 Layanan

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 733.150.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Rp. 4.802.807.000,- (Empat milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 5.535.957.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fernando L. Tobing, S.P., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I
Medan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Fernando L. Tobing, S.P., M.Si.
NIP. 19740323 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 238471. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	20 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	20 unit
5432.EAE.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana internal.	3 unit
5432.EAE.001.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana internal satker terlaksana	3 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terbitnya Kebijakan Bidang Kehutanan	3 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (676,62 Km).	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutam diterbitkan (136 Km)	2 Rekomendasi kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan informasi Publik.	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	3 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rencana pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; - Seluruh usaha dan kegiatan telah menerapkan kegiatan berwawasan lingkungan. 	
5436.QMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi geospasial kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi terlayani	2 Layanan
5436.QMA.002.	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	2 Layanan

Program/Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 9.359.487.000,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 5.127.222.000,- (Lima milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 408.459.000,- (Empat ratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Dampak Lingkungan

Rp. 763.877.000,- (Tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 15.659.045.000,- (Lima belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah I Medan,



Fernando L. Tobing, S.P., M.Si.
NIP. 19740323 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 238535. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II
PALEMBANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	- Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan - Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	2 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (779 Km)	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5433. PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan diperbaharui setiap tahun	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	5 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	4 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani 100% - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	2 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	2 Badan Usaha

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Rencana Pembangunan sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan - Seluruh Usaha dan Kegiatan telah menerapkan kegiatan berwawasan lingkungan 	
5436.QMA	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	1 Layanan
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 8.226.662.000,- (Delapan milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 8.237.626.000,- (Lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 400.876.000,- (Empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

Rp. 185.067.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Dampak Lingkungan

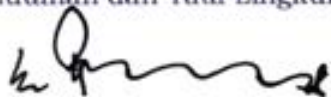
Rp. 2.123.140.000,- (Dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 19.173.371.000,- (Sembilan belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah II Palembang,



Dr. Manufas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novie Trionadi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III
Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Pihak Pertama,

Novie Trionadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 427394. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III
PONTIANAK

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433. PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (477 Km)	1 Rekomendasi kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan diperbaharui setiap tahun	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	4 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani (3 Klaster)	3 Layanan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani 100% - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	3 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	3 Badan Usaha

Program/Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 8.015.821.000,- (Delapan milyar lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 4.222.607.000,- (Empat milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 376.577.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

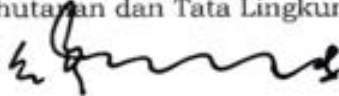
Rp. 152.157.000,- (Seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 12.767.162.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah III Pontianak,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Tarticius Kustanto
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV
Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 427423. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV
SAMARINDA

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	<p align="center">80 Poin</p> <p align="center">Level 3</p> <p align="center">1 Laporan</p>
5432.EAA	Layanan Perkantoran.	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran.	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum.	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	5 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker.	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	5 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal.	Layanan Sarana Internal terlaksana.	8 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal.	Layanan Sarana Internal terlaksana.	8 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan.	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (166 Km).	1 Rekomendasi kebijakan
5433.QAH	Pelayanan Publik Lainnya.	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 Layanan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5433.QAH.001	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari kawasan Hutan.	Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 Layanan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan diperbaharui setiap tahun.	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik.	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	3 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan.	- Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha.	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana.	1 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana.	1 Badan Usaha

Program/Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 9.837.856.000,- (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Rp. 3.889.509.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Rp. 346.928.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan.

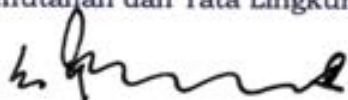
Rp. 108.530.000,- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 14.182.823.000,- (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Ag
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah IV Samarinda,



Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Heryadi, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
Banjarbaru

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SATUAN KERJA : 239963. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V
BANJARBARU**

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	107 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	107 unit
5432.EAE.	Layanan Prasarana Internal	Layanan prasarana internal terlaksana	2 unit
5432.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	Layanan prasarana internal terlaksana	2 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan.	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (358 Km).	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	3 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	2 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	2 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	2 Badan Usaha

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 10.692.332.000,- (Sepuluh milyar
enam ratus sembilan puluh dua
juta tiga ratus tiga puluh dua
ribu rupiah).

**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN**

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan

Rp. 1.786.304.000,- (Satu milyar
tujuh ratus delapan puluh enam
juta tiga ratus empat ribu
rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya
Hutan

Rp. 315.903.000,- (Tiga ratus lima
belas juta sembilan ratus tiga
ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

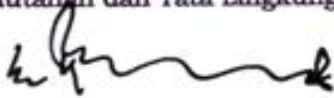
Rp. 144.475.000,- (seratus empat
puluh empat juta empat ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 12.939.014.000,- (Dua belas
milyar sembilan ratus tiga puluh
sembilan juta empat belas ribu
rupiah)

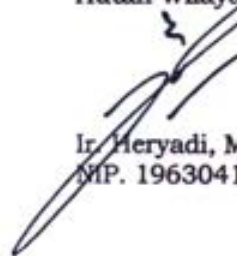
Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah V Banjarbaru,



Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI
Manado

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Dr. Fernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
NIP. 19720131 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 427417. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan.	2 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (315,1 Km).	2 Rekomendasi Kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	3 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	- Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	14 Badan Usaha
5435.BAC.001.	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	14 Badan Usaha

Program / Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 7.774.576.000,- (Tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 2.260.927.000,- (Dua miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 214.313.000,- (Dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

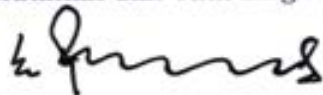
Rp. 815.681.000,- (Delapan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 11.065.497.000,- (Sebelas miliar enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VI Manado,



Dr. Fernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
NIP. 19720131 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariani Samal, S.Hut., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII
Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA : 238631. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
MAKASSAR

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	24 Unit
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana.	24 Unit
5432.EAE.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal.	2 Unit
5432.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana.	2 Unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan.	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (541 Km).	1 Rekomendasi Kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH. 	

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	6 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	5 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	4 Badan Usaha
5435.BAC.001.	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	4 Badan Usaha

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 10.467.318.000,- (Sepuluh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 5.217.744.000,- (Lima miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 514.368.000,- (Lima ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

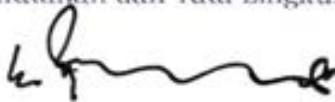
Rp. 255.399.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 16.454.829.000,- (Enam belas miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VII Makassar,



Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

I. Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
NIP. 19630824 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 238670. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
DENPASAR

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	47 Unit
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana.	47 Unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.BAH.	Pelayanan Publik Lainnya	Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	6 Layanan
5433.BAH.002	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	6 Layanan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	7 Layanan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	6 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pangan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH.	2 Badan Usaha
5435.BAC.001.	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	2 Badan Usaha

Program / Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 10.388.320.000,- (Sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 1.159.443.000,- (Satu milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 483.193.000,- (Empat ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

Rp. 201.589.000,- (Dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 12.232.545.000,- (Dua belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

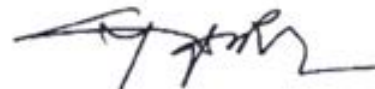
Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VIII Denpasar,



I Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
NIP. 19630824 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuhdan Arief F, S.Hut., MT, MSc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Pihak Pertama,

Zuhdan Arief F, S.Hut., MT, M.Sc.
NIP. 19770314 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 427401. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan.	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (259 Km).	1 Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH. 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	3 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan

Program / Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 7.856.460.000,- (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 1.808.980.000,- (Satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

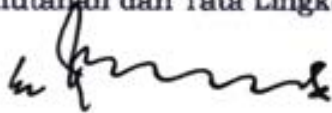
Rp. 352.289.000,- (Tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 10.017.729.000,- (Sepuluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wihavah IX Ambon,



Zuhdan Atief F, S.Hut., M.T, M.Sc.
NIP. 19770314 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Arnold Manting
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X
Jayapura

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA : 239970. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X
JAYAPURA

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	- Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan; - Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan.	2 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (296 Km).	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (3.455 Km).	1 Rekomendasi Kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja	

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH.	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	5 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	4 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	- Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	2 Badan Usaha
5435.BAC.001.	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	2 Badan Usaha
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan	- Seluruh Rencana Pembangunan sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; - Seluruh Usaha dan Kegiatan telah menerapkan kegiatan berwawasan lingkungan.	
5436.QMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani.	1 Layanan
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan

Program / Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 7.780.240.000,- (Tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 36.600.767.000,- (Tiga puluh enam miliar enam ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 576.685.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

Rp. 278.575.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Program Kualitas Lingkungan Hidup

Pencegahan Dampak Lingkungan

Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

Jumlah

Rp. 46.236.267.000,- (Empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah X Jayapura,



Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendro A. Basori, S.Hut.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI
Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 649877. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI
YOGYAKARTA

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	31 Unit
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana.	31 Unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan.	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (266,66 Km).	1 Rekomendasi Kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui	5 Layanan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	4 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 12.206.782.000,- (Dua belas miliar dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 2.194.419.000,- (Dua miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 426.165.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 14.827.366.000,- (Empat belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XI Yogyakarta,



Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Tridjoko
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Tanjung Pinang.

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		setiap tahun.	
5434.BMA.002.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	4 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani.	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	1 Badan Usaha
5435.BAC.001.	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	1 Badan Usaha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 439649. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII
TANJUNG PINANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	10 Unit
5432.EAD.001	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana.	10 Unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan.	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (100 Km).	1 Rekomendasi Kebijakan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH. 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui	5 Layanan

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 5.220.831.000,- (Lima miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 315.692.000,- (Tiga ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Percencanaan Kawasan Hutan

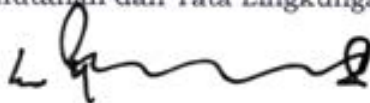
Rp. 101.981.000,- (Seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 7.138.504.000,- (Tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,



Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mursid Wibawa, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII
Pangkal Pinang

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Mursid Wibawa, S.Si., M.Si.
NIP. 19680227 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA : 439655. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII
PANGKAL PINANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (135 km)	1 Rekomendasi Kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	7 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani (6 Klaster).	6 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani (1 Lokasi).	1 Layanan
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan usaha.	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	1 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana (1 Lokasi)	1 Badan Usaha

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 5.530.728.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 1.843.520.000,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 488.011.000,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta sebelas ribu rupiah).

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Rp. 77.857.000,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 7.940.116.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam belas ribu rupiah).

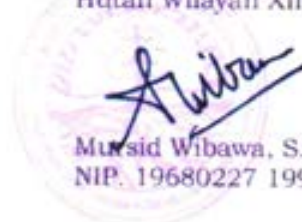
Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang,



Mursid Wibawa, S.Si., M.Si.
NIP. 19680227 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Moech Firman Fahada, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV
Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Moech Firman Fahada, M.P.
NIP. 19680215 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA : 439661. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV
KUPANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001.	Inventarisasi verifikasi dan penyelesaian BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (117 km)	1 Rekomendasi Kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	5 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani (4 Klaster).	4 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani (1 Lokasi).	1 Layanan
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pengguna-an kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan usaha.	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	2 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana (2 Lokasi)	2 Badan Usaha

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 5.783.196.000,- (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 1.069.345.000,- (Satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 357.744.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Rp. 186.225.000,- (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 7.396.510.000,- (Tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIV Kupang,



Ir. Moech Firman Fahada, M.P.
NIP. 19680215 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV
Gorontalo

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA : 439670. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV
GORONTALO

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen		
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. 	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	88 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	88 unit
5432.EAE.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana internal.	1 unit
5432.EAE.001.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana internal satker terlaksana	1 unit
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terbitnya Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (227 Km).	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan informasi Publik.	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	5 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	4 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pelaksanaan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	1 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	1 Badan Usaha

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 6.068.785.000,- (Enam milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 1.541.090.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 382.051.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

Rp. 86.315.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 8.078.241.000,- (Delapan milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XV Gorontalo,



Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Heri Sunuprpto, S.Si., M.Sc
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Heri Sunuprpto, S.Si., M.Sc.
NIP. 19670527 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 439686. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	1 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	1 unit
5432.EAE.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	1 unit
5432.EAE.001.	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	1 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (450 km)	1 Rekomendasi Kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	3 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani (2 Klaster).	2 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani (1 Lokasi).	1 Layanan
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan usaha.	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	2 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana (2 Lokasi)	2 Badan Usaha

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 7.248.350.000,- (Tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 3.660.818.000,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 476.181.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

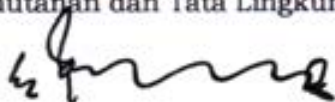
Rp. 194.249.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 11.579.598.000,- (Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVI Palu,



Dr. Heri Sunuprpto, S.Si., M.Sc.
NIP. 19670527 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fedrik Ap, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII
Manokwari

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Fedrik Ap, S.Sos., M.Si.
NIP. 19780227 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 439692. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII
MANOKWARI

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	14 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	14 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan.	- Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan - Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	2 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001.	Inventarisasi verifikasi dan penyelesaian BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (531 km)	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Tata Batas Kawasan Hutan yang diselesaikan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (245 km)	1 Rekomendasi Kebijakan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani (3 Klaster).	3 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani (1 Lokasi).	1 Layanan

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 6.682.723.000,- (Enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 7.147.937.000,- (Tujuh milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 334.692.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Jumlah

Rp. 14.165.352.000,- (Empat belas milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

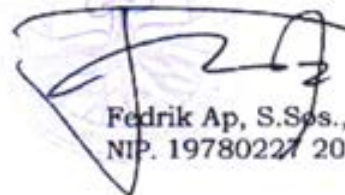
Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVII Manokwari,



Fedrik Ap, S.Sos., M.Si.
NIP. 19780227 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Banda Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 065132. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII
BANDA ACEH

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	15 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	15 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV.	Kebijakan Bidang Kehutanan.	- Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan - Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan	2 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001.	Inventarisasi verifikasi dan penyelesaian BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (11 km)	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Tata Batas Kawasan Hutan yang diselesaikan.	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan (506 km)	1 Rekomendasi Kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	- Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	- (3)	(4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	
5434.BMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani (3 Klaster).	3 Layanan
5434.BMA.003.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani (1 Lokasi).	1 Layanan
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	- Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan usaha.	Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	1 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	Pelaksanaan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana (1 Lokasi)	1 Badan Usaha
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan.	Seluruh Rencana Pembangunan sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	
5436.QMA.	Data dan Informasi Publik.	Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani.	1 Layanan
5436.QMA.002.	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Penyediaan data dan informasi hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani	1 layanan

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 5.470.469.000,- (Lima milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 4.279.809.000,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 299.487.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan

Rp. 72.406.000 (Tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Dampak Lingkungan

Rp. 229.868.000 (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 10.352.039.000,- (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh,



Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX
Pekanbaru

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Sofyan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19571231 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 095154. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX
PEKANBARU

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	8 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	8 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terbitnya Kebijakan Bidang Kehutanan	2 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (300 Km).	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutam diterbitkan (442 Km)	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan informasi Publik.	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	6 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	5 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	3 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	3 Badan Usaha

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 5.843.525.000,- (Lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 5.725.490.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 502.126.000,- (Lima ratus dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Perencanaan Kawasan Hutan

Rp. 182.189.000,- (Seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 12.253.330.000,- (Dua belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIX Pekanbaru,



Sofyani, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19771231 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
Bandar Lampung

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama,

Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
NIP. 19670919 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 125165. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX
BANDAR LAMPUNG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terbitnya Kebijakan Bidang Kehutanan	2 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (38 Km).	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutam diterbitkan (310 Km)	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan informasi Publik.	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	5 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	4 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rencana pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; - Seluruh usaha dan kegiatan telah menerapkan kegiatan berwawasan lingkungan. 	
5436.QMA.	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi geospasial kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi terlayani	1 Layanan
5436.QMA.002.	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan

Program/Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 6.077.752.000,- (Enam milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 2.562.030.000,- (Dua milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 437.764.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Dampak Lingkungan

Rp. 216.115.000,- (Dua ratus enam belas juta seratus lima belas ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 9.293.661.000,- (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus senam puluh satu ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XX Bandar Lampung,



Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
NIP. 19670919 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Palangkaraya

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 19903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 145160. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI
PALANGKARAYA

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	203 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	203 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terbitnya Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002.	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasam hutam diterbitkan (3.037 Km)	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan Informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	
5434.BMA	Data dan informasi Publik.	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	6 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	5 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan	- Seluruh rencana pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan seluruh usaha dan kegiatan telah menerapkan kewenangan lingkungan. - Seluruh rencana pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan seluruh usaha dan kegiatan telah menerapkan kewenangan lingkungan.	
5436.QMA	Data dan Informasi Publik	Penyediaan data dan informasi geospasial kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan terlayani	1 Layanan
5436.QMA.002	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan terlayani secara partisipatif di wilayah BPKH	Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi lapangan Indeks Kawasan dengan Indeks Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rp. 6.884.268.000,- (Enam milyar delapan ratus delapan puluh empat juga dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Rp. 21.811.000.000,- (Dua puluh satu milyar delapan ratus sebelas juta rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Rp. 387.795.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pengendalian Dampak Lingkungan

Rp. 1.667.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Jumlah

Rp. 30.750.063.000,- (Tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XXI Palangkaraya,



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 19903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eddy Bambang Permadi, S.Sos., M.P.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII
Kendari

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Eddy Bambang Permadi, S.Sos., M.P.
NIP. 19640527 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA : 205105. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII
KENDARI

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL; - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; - Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	
5432.EAA	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran.	1 Layanan
5432.EAA.001.	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAC.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana.	1 Layanan
5432.EAD.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal.	13 unit
5432.EAD.001.	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal satker terlaksana	13 unit
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); - Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; - Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan.	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan (175 Km).	1 Rekomendasi kebijakan

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH; - Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 	
5434.BMA.	Data dan informasi Publik.	Penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun.	4 Layanan
5434.BMA.002	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	3 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH terlayani	1 Layanan
5435.	Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; - Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	
5435.BAC.	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	3 Badan Usaha
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana.	3 Badan Usaha

Kegiatan**Anggaran****PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rp. 5.391.304.000,- (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah).

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Rp. 1.793.825.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Rp. 316.382.000,- (Tiga ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perencanaan Kawasan Hutan Rp. 267.285.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Jumlah Rp. 7.768.796.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

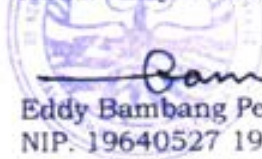
Jakarta, Januari 2021

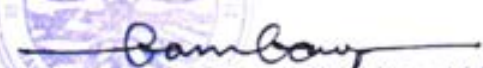
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XXII Kendari,




Eddy Bambang Permadi, S.Sos., M.P.
NIP. 19640527 199103 1 005

Lampiran II.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor : P.2/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2021

Tanggal : 25 Januari 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama :

Jabatan :

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....
NIP.

.....
NIP.

Program/Kegiatan

Anggaran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan :

BAGIAN/SUB DIT/BPKH/SUB BAGIAN/
SEKSI :

Rp.
(.....
.....
.....)

Jakarta, 2021

Set/Dit/Bagian/SubDit/
.....,

Bagian/Sub Dit/Sub Bagian/ Seksi
.....,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran III.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor : P.2/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
 Set./Dit./BPKH :

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target per Triwulan			
				B 03	B 06	B 09	B 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

..... 2021
 Set./Dit./BPKH

.....
 NIP.